

DINAMIKA KONFLIK ETNIS DI TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Sefri Barkah¹, Mulyanto², Kgs. Muhamammad Sobri³

¹Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, STISIPOL Chandradimuka Palembang.

²Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya

³Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya

Email : sefribarkah.18@gmail.com

Received : May 2016; Accepted October 2016 ; Published November 2016

Abstract

This research aims to observe about the main source of ethnic conflict in Toboali South Bangka, any parts that involved in this ethnic conflict, what stages of the dynamics of ethnic conflict and conflict resolution models such as what needs to be implemented in an attempt to create a peace between these two ethnic groups. This research is a qualitative research using the paradigm of constructivism and the intrinsic case study research strategy. In determining the informant is done by using purposive sampling method. Data was collected by in-depth interviews, participant observation and documentation of the number of informants as many as seventeen. Results from this study indicate that the source of ethnic conflict in Toboali there are three sources: 1). Scramble of Timah Resources. 2) Regarding the difference in interest Manage Access Sea. 3). The existence of social segregation. The period of conflict dynamics can be identified into 4 periods they are 1) The beginning of migration of Selapan migrant to Toboali untill appear of bad prejudice (Praconflict Periode 1980-2001). 2). Beginning of digging of Tin by people, untill appear of confrontation actions (Confrontation Periode 2001-2011). 3) Agression action by group of Bangka Ethnic to residential of Selapan Ethnic, untill demonstration action that ended by commotion (Crisis Period 2011-2014). 4). Publication of Inpres No.1 on 2014 about handling safety disturbances intra country by central government (Pasca Conflict Periode 2014-now). Then the actors that involved in the conflict can be identified from group of Bangka ethnic including a). The Leader of Bangka Fisherman Association. b). The Social Figure of Bangka Ethnic c). The Racketeer of mining industries While an actor from Selapan ethnic was Tin owner that was a Selapan social figure. Recommendations of conflict resolution that offered is mediation to accommodate all interests and empowering groups involved.

Keywords: Dynamics of Conflict, Ethnic Bangka, Ethnic Selapan

Abstrak

Penelitian ini berjudul Dinamika Konflik Etnis Di Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi sumber konflik etnis di Toboali Bangka Selatan. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik etnis

tersebut. Bagaimana tahapan dinamika konflik etnis dan model penyelesaian konflik seperti apa yang perlu diimplimentasikan dalam upaya menciptakan perdamaian antara kedua etnis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma *konstruktivisme* dan dengan strategi penelitian *studi kasus intrinstik*. Dalam penentuan informan dilakukan dengan menggunakan cara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak tujuh belas orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi sumber konflik etnis di Toboali terdapat tiga sumber yaitu 1). Perebutan sumber daya timah. 2) Perbedaan kebudayaan mengenai akses kelola laut. 3). Adanya segregasi sosial. Periode dinamika konflik dapat diidentifikasi menjadi empat periode yaitu 1). Awal kedatangan migrant Selapan di Toboali hingga munculnya prasangka (Periode prakonflik 1980-2001). 2). Dimulainya penambangan timah oleh rakyat, hingga munculnya aksi-aksi konfrontasi (Periode konfrontasi 2001-2011). 3). Aksi penyerangan oleh kelompok Etnis Bangka ke pemukiman Etnis Selapan, hingga aksi demonstrasi yang berujung kericuhan (Periode krisis 2011-2014). 4) Dikeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2014 mengenai penanganan gangguan keamanan dalam negeri oleh Pemerintah Pusat (Periode Pascakonflik 2014-sekarang). Kemudian aktor yang terlibat dalam konflik dapat teridentifikasi diantaranya dari kelompok etnis Bangka adalah a). Ketua himpunan keluarga nelayan (tokoh nelayan). b) Tokoh masyarakat Bangka. c) Preman tambang. Sedangkan aktor dari Etnis Selapan adalah tokeh timah yang sekaligus tokoh masyarakat Selapan. Rekomendasi resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan kembali memediasi kedua pihak berkonflik untuk kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk memberdayakan serta mengakomodir semua kepentingan kelompok yang terlibat konflik.

Kata Kunci : *Dinamika Konflik, Etnis Bangka, Etnis Selapan.*

PENDAHULUAN

Selama adanya perbedaan latar belakang sosial budaya dan kepentingan maka sepanjang itu pula konflik akan hadir. Konflik tidak selamanya harus dimaknai dalam bentuk pertikaian atau permusuhan, tetapi bisa mengandung makna kompetisi, ketegangan atau ketidak sepehaman. Sebuah kelompok etnis terdapat ikatan-ikatan kuat antar anggota kelompok yang berlandaskan pada garis primordial atau atas kesamaan identitas sosial yang ia peroleh sejak lahir. Namun yang Menjadi permasalahan adalah apabila primordialisme melahirkan paham etnosentrisme, yaitu sebuah paham yang memandang rendah kelompok lain. Konflik etnis yang terjadi antara Etnis Bangka dan Etnis Selapan di Toboali telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, namun baru mengalami eskalasi dan intensitas tinggi semenjak adanya derugulasi tata niaga timah di Pulau Bangka Belitung. Timah adalah komoditas yang tidak bisa disentuh oleh penduduk lokal maupun migran pendaatang seperti Etnis Selapan. Kontrol pemerintah pusat atas komoditas timah begitu kuat sehingga pemerintah

pusat menggunakan tangan-tangan militer untuk memproteksi.

Deregulasi tata niaga timah di Pulau Bangka Belitung dengan dikeluarkannya Kepmenperindag No 558/MPP/Kep/12/1998 yang isinya tidak lagi menempatkan komoditas timah sebagai komoditas strategis negara, dan sebagai implikasinya timah kemudian menjadi barang bebas. pasca dikelurkannya Kepmenperindag tersebut. Pemerintah Daerah Bangka merespon dengan menerbitkan Perda Bupati Bangka No 6/2001 (mengenai pelaksanaan pertambangan umum di Bangka) yang intinya mengatur bahwa rakyat boleh melakukan penambangan dengan syarat dan aturan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Munculnya keputusan dan perda inilah pada akhirnya menjadi pintu masuk bagi munculnya penambangan timah oleh masyarakat. Masyarakat berlomba-lomba melakukan penambangan dengan menggunakan berbagai cara, termasuk menarik minat warga Etnis Selapan yang berasal dari Kabupaten OKI Sumatera Selatan untuk melakukan migrasi besar-besaran ke Provinsi Bangka Belitung termasuk di Toboali, dengan tujuan untuk mencoba peruntungan mencari nafkah, dengan menjadi penambang timah Inkonvensional (TI) ataupun penambang timah *illegal*. (Nordholt, 2007). Konflik ini menjadi masalah serius pemerintah pusat dan setempat. Inpres Nomor 1 Tahun 2014 mengenai rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri, dengan menekankan dan menghimbau pemerintah setempat untuk melakukan penanggulangan konflik antar penduduk pendatang dan penduduk lokal agar tidak terjadi disintegrasi bangsa di daerah. Beragam hal ini dapat disebabkan karena konflik horizontal antar kedua etnis tersebut bersifat kompleks yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, budaya bahkan politik. Pemaparan diatas menunjukkan bahwa perlu diadakannya penelitian ilmiah dengan pendekatan sosiologis yang *multidisipliner* mengenai konflik etnis yang terjadi di Toboali, terutama melalui metode penelitian kualitatif yang mendalam dengan strategi penelitian studi kasus. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dinamika konflik yang komperhensif mengenai apa yang menjadi sumber konflik dan siapa-siapa saja yang menjadi aktor konflik, sehingga pada akhirnya dapat memformulasikan upaya resolusi konflik agar dapat digunakan sebagai bahan acuan, baik dalam upaya mencegah maupun menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah tersebut atau sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan migran pendatang, terutama agar dapat memberikan suatu penanganan yang tepat dalam mengantisipasi konflik dan dampak yang mungkin dapat terjadi dimasa mendatang. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika konflik antara Etnis Bangka dan Etnis Selapan di Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi sumber konflik dan siapa yang menjadi aktor konflik.

Sosialisasi dari Perspektif Konflik Multidisipliner

Sebagai acuan dan perbandingan, berikut terdapat hasil penelitian dan kajian yang sudah ada mengenai konflik, diantaranya dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Zuni Lusi Astuti (2012) mengenai “Konflik Pasir Besi : Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulonprogo” yang mendeskripsikan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, yang dalam konteks ini jenis konflik yang terjadi berupa konflik vertikal dan material, yaitu dimana konflik melibatkan antara masyarakat Kulon Progo yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan pemerintah setempat. Penelitian lain oleh Ucu Martanto (2007) mengenai “Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan : membaca Papua Melalui Pendekatan *Environmental Security*” yang mengeksplorasi dan menghubungkan fenomena konflik di Papua dengan kelangkaan lingkungan dalam perspektif teoritis *Environmental Security*. Amelia Maika (2007) melakukan penelitian mengenai “Pendekatan Kultural Sebagai Strategi Resolusi Konflik : Kasus Khon Kaen Thailand” yang menjelaskan bagaimana suatu strategi pendekatan kultural dapat menjadi suatu cara alternatif dalam menyelesaikan permasalahan konflik masyarakat tradisional di Thailand. Penelitian serupa dilakukan oleh Alfitri dan kawan-kawan (2013) mengenai “Model Penyelesaian Konflik Berbasis Nilai Kearifan Lokal Tepung Tawar Pada Komunitas Talang Sejemput Lahat Sumatera Selatan”. Penelitian ini cukup mewakili penjelasan mengenai peran kepemimpinan adat *Juraytuwe* dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat adat di Talang Sejemput Lahat. Penelitian oleh Yusran Anizam (2002) dengan tema penelitian Kajian terhadap konflik etnis melayu dan etnis madura di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, yang memfokuskan pada dampak atau sebab-sebab yang ditimbulkan akibat konflik etnis yang terjadi di Sambas dan memformulasikan strategi penyelesaian konflik agar konflik horizontal yang terjadi tidak semakin meluas. Penelitian lain oleh M Ali Alhumaidy (2007) yang menganalisa penyebab atau sumber terjadinya konflik antar etnik di Kalimantan Barat yang terfokus kepada tingkatan stratifikasi sosial. Penjabaran tinjauan pustaka yang telah disebutkan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan mengeksplorasi hal-hal yang belum terungkap. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebagai wujud dari telaah terhadap kompleksitas konflik yang timbul di dalam masyarakat kontemporer di Indonesia.

Kehadiran etnis pendatang ke suatu daerah yang notabene dihuni oleh masyarakat yang berbeda secara bahasa, adat dan budaya tentulah dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dampak, baik itu mengarah pada integrasi atau disintegrasi. Namun yang terjadi di Toboali Bangka Selatan lebih cenderung menunjukkan ke arah terjadinya disintegratif antara kedua etnis. Hal ini terlihat tingginya intensitas konflik antara kedua etnis. Menurut Ramlan Surbakti (1999) konflik etnis seringkali muncul karena adanya perbedaan primordialisme yang dianut oleh masing-masing anggota kelompok

sejak ia lahir. Adanya paham primordialisme pada setiap individu merupakan suatu hal yang muncul secara alami, namun munculnya paham etnosentrisme tidak dapat begitu saja dipahami sebagai sebuah proses yang tercipta secara alami. Paham etnosentrisme dapat pula merupakan sebuah hasil dari manipulasi dan mobilisasi para aktor untuk memicu potensi terjadinya konflik. Nilai-nilai sosial etnis, bentuk-bentuk kultural, dan ciri-ciri penting etnis menjadi sumber politik bagi para aktor konflik dalam persaingan memperoleh kekuasaan politik dan akses sumber ekonomi. Para elit memanfaatkan sentimen etnis dan melakukan mobilisasi untuk mendapatkan keuntungan dari situasi konflik yang tercipta (Brass : 1991).

Konflik yang melibatkan etnis Selapan dan etnis Bangka dapat dilihat dan diklasifikasikan dalam konsep tipe konflik secara umum. tiga tipe konflik tersebut yaitu (1) Tanpa Konflik. Merupakan tipe yang menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai. (2) Konflik Laten. Merupakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi, dan perlu di angkat ke permukaan agar bisa ditangani. (3) Konflik Terbuka. Merupakan situasi di mana konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

Tipe konflik etnis yang terjadi di Toboali kemudian dapat dilihat dalam dimensi kekerasan yang dilahirkan. Berdasarkan konsep kekerasan Galtung (1990) kekerasan konflik yang terjadi di Toboali dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu : (1) Kekerasan langsung. Dapat dilihat pada kasus suatu kerusuhan atau pertikaian yang menyebabkan timbulnya korban jiwa maupun materi. (2) Kekerasan Budaya atau kekerasan simbolik. Bentuk kekerasan budaya dapat disebut sebagai motor dari kekerasan langsung dan juga sebagai sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Sumber kekerasan budaya ini berangkat dari etnisitas penduduk pribumi dan migran pendatang. Selain dari tipe konflik dan dimensi kekerasan yang telah dapat diidentifikasi dan diklasifikasi diawal. Analisis konflik etnis yang terjadi masih memerlukan langkah lanjutan berupa pemetaan konflik. Langkah lanjutan ini diperlukan karena konflik etnis yang terjadi begitu kompleks dan belum diketahui secara pasti apa yang menjadi sumber konflik, siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik dan bagaimana tahapan konflik. Sehingga terdapat beberapa model, konsep ataupun teori oleh para pakar yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memetakan konflik etnis antara etnis Bangka dan etnis Selapan di Toboali Bangka Selatan secara ilmiah.

Langkah awal yang dilakukan peneliti untuk mengetahui dinamika konflik yaitu dengan menggunakan model pemetaan konflik multidisipliner yang dikembangkan oleh sosiolog dari United Nation-University for Peace. Amr

Abdallah, yaitu model SIPABIO (2002) untuk mengetahui Sumber konflik dan aktor yang terlibat dalam konflik. Model pemetaan konflik SIPABIO Amr Abdallah adalah : 1) Source (sumber konflik). Konflik disebabkan oleh sumber yang berbeda-beda sehingga melahirkan tipe konflik yang berbeda pula. 2) Isues (isu-isu). Isu merujuk pada saling keterkaitan tujuan yang tidak sejalan di antara pihak bertikai dan pihak lain yang tidak teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik. 3) Parties (pihak). Pihak atau aktor berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan, maupun pihak tersier yang sering disebut sebagai pihak netral untuk mengintervensi konflik. 4) Attitudes (sikap). Sikap adalah perasaan dan persepsi yang memengaruhi pola perilaku konflik. Sikap bisa muncul dalam bentuk yang positif dan negatif bagi konflik. 5) Behavior (perilaku). Perilaku adalah aspek tindakan sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk tindakan koersif ataupun tindakan non koersif. 6) Intervention (campur tangan pihak lain). Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian. 7) Outcame (hasil akhir). Outcame adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi.

Setelah pemetaan konflik, tahap selanjutnyayaitu menganalisis tahapan dinamika konflik yang terjadi. Peneliti menggunakan konsep analisis dinamika konflik menurut Simon Fisher. Konsep ini dipilih karena dianggap cukup relevan dalam memahami fase atau tahapan dinamika konflik etnis yang terjadi di Toboali Bangka Selatan. Konsep dinamika konflik menurut Simon Fisher (2000) akan digunakan untuk menjelaskan tahapan konflik melalui dimensi waktu atau sejarah konflik yang telah terjadi dalam periode tertentu, yang diantaranya meliputi : (1) fase pra konflik, ialah periode saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik yang masih tersembunyi dalam pandangan umum. (2) fase konfrontasi, yaitu suatu periode dimana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi konfrontasi. (3) fase krisis, ialah puncak konflik. Tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan masal. (4) fase pascakonflik, ialah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal antara kedua belah pihak. Pascakonflik bisa disebut juga sebagai tahapan de-eskalasi konflik kekerasan. De-eskalasi konflik kekerasan bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kedua belah pihak berkonflik menemukan pemecahan masalah dari konflik. Kedua, salah satu pihak mengalami kekalahan luar biasa, tanpa mendapatkan apapun yang diperbutkan, dan tidak memiliki kemampuan melanjutkan konflik. Ketiga, semua pihak berkonflik mengalami kehancuran dan tidak mampu melanjutkan konflik. Keempat, pihak berkonflik menghentikan

sementara waktu untuk menyusun strategi selanjutnya. Analisis dan memetakan dinamika konflik membuat peneliti bisa menemukan langkah multidisipliner yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan meresolusi konflik. Maka langkah selanjutnya ialah upaya mengendalikan dan memberikan solusi atau tawaran resolusi konflik. Data yang telah diperoleh sebelumnya akan dapat menjadi acuan-acuan penting dalam meresolusi konflik. Peneliti memilih menawarkan model penyelesaian konflik Berkelanjutan berbasis pemberdayaan berkelanjutan sebagai kerangka acuan dalam upaya penyelesaian konflik etnis yang terjadi di Toboali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diadakan di Toboali, kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung dan berlangsung selama tiga bulan. Alasan lokasi ini dipilih dikarenakan secara historis Toboali merupakan tempat awal dimana terjadinya migrasi Selapan ke Pulau Bangka Belitung sebelum akhirnya menyebar di beberapa daerah lain di Pulau Bangka seperti di Muntok, Pangka Pinang, Koba dan Sungai Liat. Selain daripada itu, Toboali juga merupakan tempat dimana intensitas konflik antar etnis yang terjadi cukup tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma *konstruktivisme*. Penggunaan paradigma ini telah membantu dalam memperoleh gambaran dan konstruksi utuh dan komprehensif mengenai konflik antara etnis Selapan dan etnis Bangka yang terjadi di Toboali Bangka Selatan. Terutama memperoleh data yang akurat mengenai sumber konflik, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan sejarah perjalanan konflik yang terjadi. Strategi penelitian yang digunakan adalah *studi kasus intrinsik*. Strategi ini dipilih karena penelitian yang dilakukan memerlukan pemahaman secara utuh terhadap konflik etnis yang terjadi di Toboali, dimana permasalahan konflik etnis yang terjadi di Toboali cukup kompleks dan melibatkan banyak dimensi seperti dimensi sosial, ekonomi bahkan politik. Objek penelitian adalah kelompok yang terlibat dalam pusaran konflik etnis di Toboali. Oleh karena itu, unit analisis data di dalam penelitian ini adalah kelompok etnis Bangka dan kelompok etnis Selapan. Unit analisis data terkecil dalam penelitian ini adalah warga dan aktor yang terlibat dalam konflik etnis di Toboali yang bertindak dan berperilaku sebagai individu bagian dari kedua kelompok etnis tersebut.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan partisipatif. Pengamatan dilakukan tanpa memperlakukan individu atau kelompok yang diamati sebagai informan, maka pengetahuan mereka menjadi bersifat tradisional. Wawancara mendalam (*indepth-interview*) juga dilakukan dengan informan dari kedua etnis dan informan kunci yang merupakan tokoh masyarakat ataupun dari pihak pemerintah Bangka Selatan.

Penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu teknik yang bertujuan mengambil informan dari orang-orang yang benar-benar terlibat dengan permasalahan yang diteliti. Selama penelitian berlangsung, pendekatan partisipatif aktif dilakukan dengan melibatkan diri dalam berbagai aktivitas maupun kegiatan kedua etnis. Informan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Pertama, Informan Biasa berjumlah 12 orang. Informan biasa yang diwawancarai yaitu kedua masyarakat etnis yang berkonflik yaitu etnis Selapan dan etnis Bangka. Kedua, Informan kunci berjumlah 5 orang, yaitu meliputi tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, Lurah dan Camat Toboali, Bhabinkamtibnas Polsek Toboali, pejabat PT Timah Tbk dan juga sesepuh Desa yang dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi dan data mengenai permasalahan konflik etnis di Toboali Bangka Selatan. Kriteria penentuan informan berdasarkan pernah terlibat dalam konflik, masyarakat kedua etnis yang memiliki pengetahuan dan pemahamannya terhadap konflik etnis yang terjadi dan sudah dianggap dewasa dengan minimal usia 17 tahun keatas. Untuk informan di luar kedua masyarakat etnis tersebut, ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan melalui wawancara yang ditujukan agar dapat memperoleh data sekunder dan melakukan cek dan ricek data lainnya.

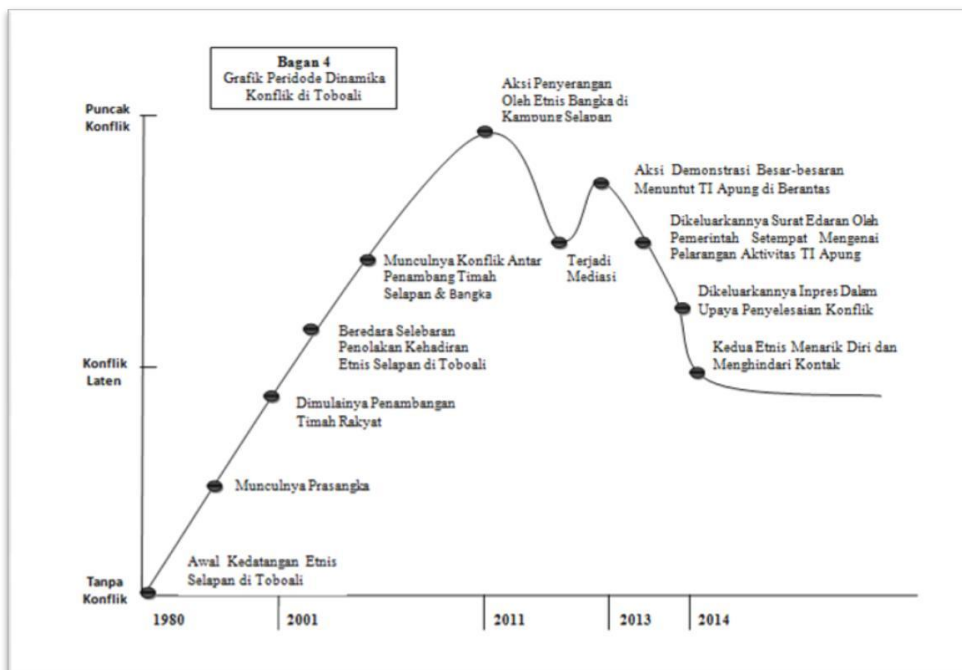
Data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan kedua anggota kelompok etnis yang berkonflik, tokoh-tokoh masyarakat dari kedua etnis dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, file note, recorder, rekaman dan kamera. Data sekunder diperoleh melalui data resmi dari instansi-instansi pemerintahan di Toboali Bangka Selatan.

PEMBAHASAN

Analisis konflik adalah dengan melakukan pemetaan konflik. Pemetaan konflik memberi deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Menurut Fisher (2000), yang harus digali dalam pemetaan konflik meliputi (1). Sumber konflik dan isu-isu yang berkembang dalam konflik. (2) Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. (3) Tahapan Dinamika konflik yang dimulai dari fase prakonflik hingga pascakonflik. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara utuh. Pemetaan konflik juga merupakan metode menghadirkan analisis terstruktur terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu pula. Metode memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik, dan juga digunakan dalam *workshop* penyelesaian konflik untuk memberikan pada para pesertanya suatu gambaran konflik yang sedang diamati. Setiap peta konflik tertentu harus dipahami mewakili pandangan para informan, dan sebagai sebuah skema lebih bersifat indikatif ketimbang bersifat menyeluruh (Mail, Romsbotham, dan Wood, 2003).

Terdapat tiga sumber konflik etnis di toboali Kabupaten Bangka Selatan yaitu 1). Perebutan Sumber Daya Timah, Hal ini dikarenakan timah termasuk dalam kategori komoditas strategis bernilai ekonomi tinggi jika dibandingkan dengan sahang dan hasil laut yang menjadi yang menjadi andalan masyarakat Bangka selama ini. Permasalahan lain yang juga timbul adalah perebutan akses atau lokasi sumber timah di darat oleh etnis Bangka, etnis Selapan serta kelompok preman tambang. Kebanyakan dari kasus perebutan lokasi menambang antara kedua kubu tidak semuanya berakhir ricuh, tetapi adapula yang berakhir dengan sebuah kesepakatan sebagai jalan tengah. Konflik dalam kasus perebutan sumber daya alam di Toboali memang tidak muncul dalam bentuk kekerasan yang masif. Namun dampaknya dapat dilihat dalam bentuk kekerasan budaya. Kekerasan budaya dalam hal ini disebut sebagai motor dari kekerasan struktural dan langsung. Kekerasan budaya dalam bentuk persepsi buruk yang akhirnya berkembang, ialah merupakan eskalsi konflik dari perbedaan-perbedaan kepentingan antara kedua etnis yang terakumulasi. 2) Perbedaan Kebudayaan Mengenai Akses Kelola Laut. Bagi masyarakat pesisir seperti etnis Bangka di Toboali. Laut merupakan salah satu sumber penghidupan bagi mereka. Berbeda halnya dengan budaya migran Selapan. Sebagai etnis perantau bekerja adalah suatu tuntutan bagi pemenuhan hidup di perantau dan sekaligus sebagai bentuk pembuktian diri kepada keluarga di kampung halaman bahwa mereka bisa sukses dan makmur diperantauan. Nelayan dan masyarakat pribumi yang merasa dirugikan dan merasa tidak dihargai budayanya karena aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh kelompok etnis Selapan. peringatan keras telah sering dilakukan agar para penambang TI apung Selapan menghentikan aktivitasnya. Namun himbauan dari para nelayan dan tokoh masyarakat Bangka seringkali tak digubris. Pemerintah setempat juga telah mengeluarkan surat edaran Nomor 540/030/DPE/2013 yang berisi larangan aktivitas TI apung dalam wilayah perairan laut Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 26 November 2013. Adanya edaran tersebut tetap saja tidak membuat para penambang TI apung menghentikan aktivitasnya. 3). Adanya Segregasi Sosial yaitu upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindari atau mengurangi kontak dengan kelompok luar. Segregasi sosial bisa dilihat dalam bentuk pengelompokan pemukiman yang berlatar belakang etnis pada suatu daerah tertentu sehingga terkesan eksklusif. Pemukiman etnis Selapan terletak di kelurahan Tanjung Ketapang Desa Payak Ubi atau lebih dikenal dengan sebutan kampung Selapan. berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa di Kampung Selapan desa Payak Ubi masih terdapat beberapa rumah non permanen yang dihuni oleh migran etnis Selapan. Kebanyakan rumah non permanen tersebut terbuat dari bahan seadanya seperti kayu, kain terpal dan kardus. Pemaparan informan diatas menunjukkan bahwa segregasi sosial juga menyebabkan timbulnya persepsi yang terbentuk dikalangan etnis Selapan, bahwa etnis pribumi Bangka sombong,

suka semena-mena dan tidak mau menjalin relasi sosial dengan mereka. Persepsi tersebut akhirnya menjadi stigma yang menggeneralisir, padahal tidak semua orang Bangka seperti yang dipersepsikan. Begitupun persepsi yang berkembang dikalangan pemuda dikedua etnis, peneliti mencoba membandingkan persepsi antara golongan tua dan golongan muda dan ternyata hasilnya sama saja. Rentan waktu dan usia antara golongan tua dan pemuda tidak menjadi pergeseran pandangan. Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa segregasi sosial yang terjadi di Toboali antara kedua etnis telah membuat gap antar mereka. Faktor seperti rutinitas kerja dan fasilitas yang di terdapat di Kampung Selapan seperti pasar tradisional dan masjid telah membentuk lingkungan eksklusif bagi mereka sehingga tidak ada ruang bagi kedua etnis untk bertemu secara intens.



Pemetaan dinamika konflik merupakan sebuah deskripsi dari sejarah perjalanan konflik yang ditampilkan dalam beberapa periode atau tahapan dinamika konflik. Diantaranya periode prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pascakonflik. 1) Awal Kedatangan Migran Selapan di Toboali Hingga Munculnya Prasangka (Periode prakonflik 1980-2001) ditandai dengan terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara etnis pribumi Bangka dan etnis Selapan sehingga menimbulkan kebencian antara mereka. Pada periode ini konflik masih tersembunyi dari pandangan umum dan di antara beberapa pihak terdapat ketegangan hubungan dan terdapat juga keinginan untuk menghindari kontak

satu sama lain.2) Dimulainya Penambangan Timah Oleh rakyat, Hingga Berkembangnya Prasangka dan Aksi- aksi Konfrontasi (Periode Konfrontasi 2001-2011) yang ditandai satu tahap di mana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak saja yang merasa ada masalah, maka para pendukungnya mulai melakukan aksi balasan atau perilaku konfrontasi lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua pihak. Pada periode ini ketegangan antara kedua etnis mulai terlihat jelas. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan semakin hari semakin tajam. Faktor sumber daya alam yang diperebutkan seperti timah, dan perbedaan budaya mengenai akses kelola laut telah memicu aksi-aksi konfrontasi antara kedua etnis. Adanya prasangka yang berkembang turut andil dalam mengeskalasikan konflik dalam skala yang lebih luas. Aksi konfrontasi pertama yang muncul akibat berkembangnya prasangka adalah adanya selebaran gelap yang beredar di lingkungan Pemda Bangka dan tempat-tempat umum pada awal November 2001. Isi dari selebaran tersebut adalah ajakan kepada warga Bangka untuk menolak kehadiran migran Selapan di Pulau Bangka tak terkecuali di Toboali. (Catatan Bangka Pos November 2001).

Aksi konfrontasi lainnya kemudian berlanjut dalam bentuk aksi kekerasan fisik yang melibatkan oknum dari kedua kelompok etnis. 3) Aksi Penyerangan Oleh Kelompok Etnis Bangka ke Pemukiman Etnis Selapan, Hingga Munculnya Aksi-Aksi Demonstrasi (Periode Krisis 2011-2014) yang dapat dikatakan sebagai puncak konflik. Tahap dimana konflik pecah dalam bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara massal. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang atau kerusuhan, ketika konflik menimbulkan korban dan kerugian secara moril maupun materil diantara kedua kelompok ataupun hanya salah satu kelompok yang bertikai. Puncak konflik etnis di Toboali pecah pada tanggal 29 Juni 2011 lalu, dimana terjadi aksi penyerangan terhadap pemukiman kampung Selapan oleh komunitas nelayan Bangka beserta penduduk etnis pribumi Bangka, dengan jumlah massa yang diperkirakan berjumlah ratusan orang. Sebulan pasca terjadinya konflik, suasana belum sepenuhnya kondusif, kedua belah pihak yang di wakili juga oleh kedua tokoh masyarakat sepakat untuk melakukan perundingan yang dimediasi oleh Lurah Tanjung Ketapang, Pihak Pemda Bangka Selatan, Kapolsek Toboali dan Kasat Pol PP. Mediasi yang dilaksanakan di Balai Desa Kampung Nelayan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang berisi bahwa pihak para penambang timah apung Selapan dilarang melakukan kembali aktivitas di sepanjang pinggiran pantai yang mengarah ke kampung nelayan lokal atau perairan yang masuk wilayah kelurahan Tanjung Ketapang. Para penambang hanya diperbolehkan menambang di sekitaran perairan yang jauh dari lokasi kampung nelayan seperti di perairan yang masuk wilayah kampung Selapan saja. Tercatat sudah terjadi tiga kali aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi dalam periode pasca konflik hingga pertengahan tahun 2015. Buntut dari

rentetan aksi demonstrasi tersebut ialah dengan dikeluarkannya surat edaran Nomor 540/030/DPE/2013 yang berisi larangan aktivitas TI apung dalam wilayah perairan laut Toboali oleh Pemkab Bangka Selatan. 4) Dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Mengenai Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri oleh Pemerintah Pusat (Periode Pascakonflik 2014-Sekarang) yang merupakan situasi dimana konflik diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai kekerasan masif, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal antara kedua belah pihak. Pascakonflik bisa juga disebut sebagai tahapan de- eskalasi konflik kekerasan. De-eskalsi konflik kekerasan bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu 1) kedua kubu berkonflik menemukan pemecahan masalah dari konflik. 2) salah satu pihak mengalami kekalahan luar biasa, tanpa mendapatkan apa-apa yang diperebutkan, dan tidak mampu untuk melanjutkan konflik. 3) semua pihak berkonflik mengalami kehancuran dan tidak mampu melanjutkan konflik. 4) Pihak berkonflik menghentikan sementara waktu konflik untuk menyusun strategi selanjutnya. Terjadinya deskalasi konflik antara kedua etnis hingga saat ini bukan berarti menandai bahwa konflik telah usai. Konflik dan potensi konflik masih tetap saja ada hingga hari ini. Sejauh ini potensi konflik etnis antara kedua kubu cukup mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2014, pemerintah pusat menginstruksikan aksi penanganan konflik etnis yang terjadi kepada pemerintah Bangka Selatan. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi Tim Deputi V Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI dengan Pemkab Bangka Selatan Pada tanggal 12 Mei 2014 di Toboali. Pasca dikelurkannya inpres tersebut pemerintah setempat merespon dengan cukup baik dan melakukan upaya-upaya penanggulangan konflik horizontal tersebut.

Aktor yang terlibat dalam kontestasi konflik pada periode awal ini hanya melibatkan beberapa orang saja. Pada fase ini para pihak yang berkonflik hanya mengambil sikap menghindari kontak dengan kelompok diluar etnis mereka sehingga eskalasi yang terjadi sebatas munculnya prasangka. Tidak adanya pihak ketiga yang mendorong agar terjadinya integrasi antara kedua kelompok etnis, membuat potensi konflik di awal periode tersebut tidak terjadi penyelesaian atau mengambang begitu saja hingga berlanjut pada fase runtuhnya rezim otoriter Suharto. Pada periode sebelumnya, aktor konflik hanya melibatkan sejumlah kepala keluarga dari kedua etnis. Pada periode pasca reformasi mengalami peningkatan. Dari kelompok etnis Bangka dapat diidentifikasi yang menjadi aktor utama yaitu diantaranya tokoh nelayan Bangka, tokoh masyarakat Bangka dan Seorang preman tambang. Sedangkan dari kelompok etnis Selapan yaitu seorang Tokeh Timah yang dianggap warga Etnis Selapan sebagai Tokoh masyarakat.

Temuan data di lapangan menunjukkan tiga orang aktor konflik yang berasal dari kelompok etnis Bangka. Aktor konflik yang *pertama* adalah EE yang merupakan salah seorang tokoh nelayan Bangka. Ketokohnya diperoleh

berdasarkan pada status dan perannya sebagai ketua Himpunan Nelayan Bangka Selatan. Selama menjabat beberapa tahun terakhir, beliau dikenal oleh warga dan kalangan nelayan Bangka sebagai sosok yang *vocal* terhadap penolakan aktivitas penambangan timah apung di perairan laut Toboali yang dilakukan oleh kelompok etnis Selapan. Aktor konflik yang *kedua* adalah Pak MM yang merupakan tokoh masyarakat etnis Bangka. Status sebagai tokoh masyarakat yang diperoleh oleh pak MM adalah berdasarkan pada sifat keteladanan beliau yang dianggap bijaksana. Selain itu faktor umur dan durasi lamanya menetap di Toboali juga menjadi salah satu faktor kenapa Pak MM dianggap warga sebagai tokoh masyarakat Bangka. Pak MM teridentifikasi sebagai aktor konflik karena perannya dalam menggerakkan dan mengugah kesadaran warga Etnis Bangka untuk terus menolak aktivitas penambangan ilegal oleh penambang etnis Selapan yang telah merugikan warga etnis Bangka selama ini. aktor konflik yang *ketiga* dari kelompok etnis Bangka bukanlah dari kalangan tokoh atau elit lokal, tetapi dapat dikatakan dari kalangan marginal. Beliau adalah DI yang merupakan salah seorang preman tambang yang cukup disegani oleh warga Bangka khususnya oleh kalangan penambang timah Bangka. Aktor konflik yang teridentifikasi dari kelompok etnis Selapan adalah MD yang merupakan seorang tokeh timah (pengusaha timah inkonvensional) yang juga diakui sebagian besar warga etnis Selapan di Toboali sebagai tokoh masyarakat mereka. Beliau dikenal sebagai sosok yang kharismatik dan dermawan terutama dikalangan penambang timah Selapan karena terciptanya hubungan patron klien.

Pasca terjadinya aksi konfrontasi pada tahun 2011 lalu mengakibatkan banyak ormas maupun aktivis gerakan melawan penambangan timah apung yang ikut mendukung upaya kelompok nelayan tradisional dan warga Bangka yang merasa terganggu dan dirugikan dengan aktivitas penambangan tersebut. Tujuan mereka yaitu untuk mengembalikan kembali fungsi laut sebagaimana mestinya. Sehingga mulai munculnya pihak ketiga dalam konflik dari kekuatan masyarakat sipil yaitu, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Cabang Bangka Selatan yang dipimpin oleh EE dan Ormas yang menamakan diri sebagai Persatuan Pemuda Bangka Selatan (PPBS) yang dipimpin oleh AA.

Munculnya dukungan dari unsur masyarakat sipil, memberikan kekuatan baru dan semakin bervariasinya gerakan yang dibangun oleh warga etnis Bangka dan kelompok nelayan tradisional. HNSI dan PPBS lebih mengarahkan warga etnis Bangka untuk tidak menggunakan jalur kekerasan dalam melawan aktivitas penambangan TI apung. Namun lebih kepada memberi desakan kepada pengambil kebijakan atau jalan advokasi. Rekonsiliasi konflik yang dilakukan pasca terjadinya konflik kekerasan pada Juni 2011 lalu adalah dengan diadakannya perundingan antara kedua kelompok yang berkonflik yang dimediasi oleh pemerintah dan kepolisian setempat. Upaya mediasi yang dilakukan

oleh pemerintah setempat dan pihak kepolisian pada saat itu melibatkan beberapa perwakilan dari kedua pihak yang berseteru. Pihak yang hadir saat itu diantaranya kedua tokoh masyarakat dari kedua etnis, Perwakilan penambang timah apung Selapan, perwakilan nelayan tradisional Bangka dan ketua himpunan nelayan. Upaya mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan produk hukum yang berisi bahwa pihak para penambang timah apung Selapan dilarang melakukan kembali aktivitas di sepanjang pinggiran pantai yang mengarah ke kampung nelayan lokal atau perairan yang masuk wilayah kelurahan Tanjung Ketapang. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti berasumsi bahwa rekonsiliasi konflik yang pernah dilakukan masih memiliki banyak kekurangan jika harus menyelesaikan konflik etnis yang begitu kompleks.

Resolusi konflik berarti masuk ke dalam sistem hubungan yang sedang berlangsung, melakukan kontak di antara kedua belah pihak yang berkonflik untuk mendorong mereka menemukan penyelesaian masalah. Maka yang perlu dikritisi dari rekonsiliasi konflik dengan mediasi ini adalah 1) Tidak terlihatnya peran sentral pemerintah sebagai pihak pendorong penyelesaian konflik. 2) Sejauh ini pemerintah setempat hanya berfokus pada salah satu sumber konflik saja yaitu mengenai perbedaan kepentingan akses kelola laut, sedangkan sumber konflik lainnya seolah diabaikan. 3) Konflik antar penambang timah apung Selapan dan Nelayan tradisional Bangka tidak dijadikan momentum untuk menyelesaikan konflik yang sudah menjalar menjadi konflik etnis. Untuk itu perlu untuk dilakukan upaya resolusi konflik yang berkelanjutan dan dapat memberdayakan serta mengakomodir semua kepentingan kelompok yang berkonflik. Peneliti menawarkan model resolusi konflik berbasis konservasi dan pemberdayaan. Model ini merupakan modifikasi dari penyelesaian konflik dengan jalan mediasi, yang menjadi pembeda dari upaya penyelesaian dengan jalur rekonsiliasi yang pernah dilakukan sebelumnya ialah terletak pada peran mediator yang diperkuat dan produk dari *problem solving*. Model resolusi konflik konservasi dan pemberdayaan berarti memposisikan masyarakat sebagai mitra dengan asumsi bahwa mereka sudah menjadi realitas bagi kawasan dengan segala aktivitas perekonomian mereka, bukan sebagai pelaku perusak lingkungan. Maka sudah sepatutnya mereka diberdayakan dan diakomodir semua kepentingannya. Rekomendasi resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan kembali memediasi kedua pihak berkonflik untuk kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk memberdayakan serta mengakomodir semua kepentingan kelompok yang terlibat konflik.

KESIMPULAN

Hasil analisis pemetaan konflik menunjukkan bahwa konflik antara etnis Bangka dan etnis Selapan di Toboali bersumber atau berakar dari perebutan sumber daya alam berupa timah, perbedaan budaya mengenai pemanfaatan

laut, dan adanya segregasi sosial yang terbentuk sejak awal kedatangan migran Etnis Selapan di Toboali. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memperburuk kondisi konflik, antara lain lemahnya kekuatan dan komitmen dari pihak pemerintahan dan pihak kewanitaan dalam hal ini kepolisian dalam menanggulangi masalah pertambangan timah rakyat yang menjadi salah satu sumber dominan konflik. aktor yang terlibat dalam konflik etnis tidaklah semuanya murni memperjuangkan kepentingan etnis, Tetapi juga terselip motif kepentingan ekonomi di dalamnya. Rekonsiliasi konflik yang pernah dilakukan oleh pemerintah setempat dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan konflik karena mengabaikan realitas dari adanya akar dan peran dari aktor konflik. Untuk itu ditawarkan sebuah model resolusi konflik berbasis pemberdayaan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik etnis yang ada. Model ini dianggap tepat karena usulan rekomendasi disusun berdasarkan pada realitas akar dan peran aktor konflik yang terjadi yang membutuhkan penanganan melalui pendekatan pemberdayaan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. dkk. 2013. *Model Penyelesaian Konflik Berbasis Nilai Kearifan Lokal Tepung Tawar Pada Komunitas Talang Sejempit Lahat Sumatera Selatan*. Palembang: Artikel Penelitian Fundamental, Universitas Sriwijaya.
- Alhumaidy, M Ali. 2007. *Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik Antar Etnik di Kalimantan Barat*. Karsam Vol XII. UI. Jakarta.
- Abdallah, Amr.2002. *Say Peace: Conflict Resolution Training Manual for Muslim Communities*. Virginia, USA : The Graduate School of Islamic and Social Science.
- Anizam. Yusran. 2002. *Kajian Terhadap Konflik Etnis Melayu dan Madura di Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan barat*. Tesis Magister sosiologi UI. Jakarta.
- Brass, Paul R. 1991. *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. Sage Publication: New York.
- Creswell, Jhon W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fisher. Simon, Dkk. 2000. *Mengelola Konflik : Strategi dan Keterampilan untuk bertindak*. Inggris: Zed Book Ltd.
- Galtung, Johan. 1999. *Transcend and transform : an introduction to conflict work*. London: PlutoPress.
- Maika. Amelia. 2006. *Pendekatan Kultural Sebagai Strategi Resolusi Konflik : Kasus KhonKaen Thailand*. Jurnal Pemikiran Sospol UGM. Yogyakarta.
- Martanto. Ucu. 2007. *Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan Membaca Papua Melalui Pendekatan Enviromental Security*. Jurnal Pemikiran UGM. Yogyakarta.